



## Untuk Asuransikan Penduduk Jogja **Pemkot Siapkan Dana Rp 23 Miliar**

**UMBULHARJO** -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan menyiapkan anggaran Rp 23 miliar untuk program jaminan kesehatan semesta atau universal coverage.

Targetnya, 80 persen dari 441.000 orang penduduk Kota Yogyakarta, miskin maupun kaya, memiliki asuransi kesehatan pada 2010.

Hal tersebut disampaikan Kepala UPT Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Yogyakarta Hj Kusminatun dalam dialog warga soal evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan di Jogja. Dialog warga digelar Komisi I DPRD Kota Yogyakarta, di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, pekan lalu.

Menurutnya, program tersebut sudah disosialisasikan sejak beberapa waktu lalu. Program rencananya diujicobakan mulai Juni nanti, di wilayah Kecamatan Tegalrejo, Danurejan dan Umbulharjo, serta Wirobrajan dan Pakualaman.

Sebanyak 3 kecamatan itu dipilih karena memiliki kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan uji coba program terpadu

pengentasan kemiskinan, sedangkan 2 kecamatan lain dipilih karena memiliki Kelurahan Siaga. Cakupan program di 5 kecamatan itu nantinya sekitar 155.000 orang.

"Dana yang disiapkan untuk pelaksanaan di 5 kecamatan pada tahun 2009 ini sebesar Rp 3,4 miliar. Dana sebanyak itu untuk subsidi kepesertaan. Sedangkan yang kita rencanakan untuk anggaran 2010 sebanyak Rp 23 miliar," ujarnya.

Penentuan rencana anggaran sebesar itu, kata dia, berdasar survei kemampuan dan kemauan membayar premi yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Hasil survei menyebutkan kemampuan membayar masyarakat rata-rata Rp 153.000 per bulan, namun kemauan membayarnya hanya Rp 53.000 perbulan.

Selanjutnya Pemkot menentukan premi yang dibayar sebesar Rp 5.000 per jiwa per bulan. Orang mampu diharapkan membayar di atas Rp 5.000 sesuai kesanggupan, sedang masya-

rakat miskin gratis.

Sekitar 1.000 orang dari 2.250 orang yang dijadikan responden survei, hanya mau membayar premi Rp 2.500 sampai Rp 5.000 per jiwa per bulan.

Kusminatun menjelaskan, premi yang dibayar mestinya antara Rp 12.000 sampai Rp 14.000 per jiwa per bulan. Karena masyarakat hanya diwajibkan membayar Rp 5.000 per jiwa per bulan, Pemkot menganggarkan Rp 7.000 sampai Rp 9.000 per jiwa per bulan sebagai subsidi untuk pembayaran premi. Jumlah total subsidi Rp 23 miliar untuk 80 persen penduduk.

Biaya rumah sakit yang *discover* universal coverage belum diputuskan secara pasti. Kemungkinannya perawatan di kelas II dengan paket terbatas. Sebab masyarakat umumnya meminta biaya yang ditanggung adalah perawatan di kelas II.

"Yang pasti, iuran yang tertib dari masyarakat akan menjadi pemenuhan kebutuhan klaim dari mereka yang sedang sakit. Untuk itu kita hadirkan juga motivator iuran dari masyarakat setempat." imbuhnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005